BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional adalah suatu proses pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk pengaturan kelahiran guna membangun keluarga sejahtera. Keterlibatan masyarakat yang semakin meluas dalam pengelolaan Program KB dengan sector-sektor pembangunan lainnya. Sehingga menjadikan Program KB Nasional sebagai salah satu sector yang strategis dan penting kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional dalam proses pengambilan keputusan, informasi manajemen keluarga berencana Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Mempunyai peran yang strategis karena harus menyediakan data dan informasi yang benar, mudah dicerna, cepat dan tepat dan akurat sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara

langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara *(mediasi*) apapun.

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan, penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat dalam ruang lingkup demokrasi dapat terjalin, dengan adanya transparansi tentang data informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk lembaga pemerintahan maupun masyarakat adalah dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology atau ICT*) di dunia telah semakin luas. Dapat dilihat dari penggunaan *ICT* yang tidak terbatas pada segala bidang. *ICT* ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari *ICT* ini adalah dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah, sehingga mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

Inisiatif *Electronik Government (E-Government)* di indonesia telah diperkenalkan melalui instruksi presiden (Inpres) No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan pada intinya, inpres tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*. Lebih jauh lagi, *E-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah. *E-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengandung konsekuensi, dimana penyelenggaraan pemerintah mengalami perubahan signifikan baik di pusat maupun di Kabupaten dan Kota. Sebagai salah satu dampak dari gerakan reformasi yang mengamanatkan dan menuntut adanya kebijakan pelayanan kepada publik/masyarakat yang dapat memberikan hasil yang lebih konkrit dan merata, dengan setiap tahapan proses pelaksanaanya dapat dipertanggung jawabkan (*acuntabel*) baik secara kinerja finansial, maupun manajerial.

Otonomi yang diberikan ke pemerintah daerah mengandung arti bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Tugas dan kewajiban tersebut menyangkut penyelenggaraan dan pengembangan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, pengembangan lingkungan yang demokratis, adil dan merata, serta menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah.

Badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah (*change tto better*), apabila tidak terlaksananya *transformasi* sistem manajemen pemerintahan yang baik, secara kelembagaan manajeman publik maupun alat-alat pemerintah insfastuktur dan suprastuktur, dengan sistem birokrasi kepada sistem yang lebih mewirausahakan birokrasi pemerintahan, transformasi sektor pemerintahan memiliki arah merubah fokus akuntabilitas pada hasil (*output and outcomes*).

Badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) pada dasarnya pengelolaan program KB nasional adalah suatu proses pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk pengaturan kelahiran guna membangun keluarga sejahtera. Keterlibatan masyarakat yang semakin meluas dalam pengelolaan program KB dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, sehingga menjadikan program KB nasional sebagai salah satu sector yang strategis dan penting kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Sistem dan mekanisme yang ada utamanya dengan pendayagunaan teknologi informasi adalah menjadi modal dasar BKKBN untuk turut melaksanakan *E-Government* sesuai dengan (INPRES) No. 3 Tahun 2003. Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan *desentralisasi* menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Persebaran urusan pemerintahan ke pemerintah daerah dilandasi dengan prinsip dalam kerangka NKRI. Keputusan Presiden (kepres) No. 103 Tahun 2000, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pada pasal 43 Kepres 103/2001 tersebut ditetapkan bahwa BKKBN mempunyai peran sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi BKKBN Provinsi dan Kab/Kota diatur dalam Kepres No.9 Tahun 2004 pasal 114 ayat (2) bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Kabupaten/Kota diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi, tetap dilaksanakan oleh pemerintah sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Tingginya dinamika dan luasnya cakupan program, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat serta tidak dapat dilakukan secara intuitif. Proses

pengambilan keputusan, informasi manajemen mempunyai peran yang strategis karena harus menyediakan data dan informasi yang benar, mudah dicerna, cepat dan tepat sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal, guna mewujudkan tersedianya data dan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengambil keputusan, maka sub sistem informasi manajemen program KB nasional (SSIM-PKBN) merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakan dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin.

Data dan informasi di lingkungan BKKBN mendapat perhatian utama dengan ditunjuknya tugas dan fungsi tersebut disusun berdasar tahap/proses dimulai dari pengumpulan, pelaporan dan statistik, pengolahan dan pengembangan teknologi informasi, analisis dan evaluasi program, diseminasi dan dokumentasi serta penyebarluasan informasi.

Sejalan dengan penggunaan komputerisasi dalam pengumpulan dan pelaporan yang dilakukan sejak tahun 1970 dan periode-periode selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi untuk dilakukan penyesuaian, hingga saat ini, database sudah dilaksanakan dengan menganut desain *Web-Based* yang dapat diakses dengan *multi user* dan melalui internet, hal tersebut secara nyata dilaksanakan pengembangan dan pemantapannya sejak tahun 2001 melalui sistem informasi kependudukan dan keluarga di beberapa Kabupaten/ Kota.

Salah satu cara untuk menciptakan praktek pemerintahan yang lebih baik ialah dengan mengalihkan aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintahan *konvensional* melalui penggunaan teknologi baru, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan perkembangan

Internet, lahirlah model birokrasi era jaringan menggantikan era manual. Model birokrasi ini dikenal dengan layanan pemerintahan secara eletronik atau disebut dengan istilah *Electronic Government* yang kemudian disingkat *E-Government*. Penerapan *E-Government* di BKKBN Provinsi Jawa Barat dengan adanya *website* *www.bkkbn.go.id* hadirnya *website* tersebut para pengguna *Internet* dan masyarakat Provinsi Jawa Barat pada khususnya dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Website* *www.bkkbn.go.id* didalamnya terdapat Sub Sistem Inormasi Manajemen Program keluarga Berencan Nasional (SSIM-PKBN) Selain itu, juga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan menggunakan *Internet.*

Persaingan dalam bisnis, yang sangat ketat di era *globalisasi*, menuntut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat mengembangkan sistem informasi berbasis komputer. Mengembangkan *E-Government*, di BKKBN Provinsi Jawa Barat berupaya menyajikan informasi mengenai Program KB yang ada di Jawa Barat, bagi pihak yang berkepentingan khususnya aparatur baik apartur BKKBN maupun masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan harapan dapat menjawab tuntutan pengelolaan sosialisasi program KB yang ada di Jawa Barat. Pembentukan dan Pembangunan Bank data Keluarga Berencana saat ini merupakan asset dan komoditi yang dapat dipergunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta. Pembentukan dan Pembangunan Bank data Keluarga Berencana

saat ini merupakan asset dan komoditi yang dapat dipergunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta.

Implikasi dari penyerahan kewenangan tersebut untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan pengelolaan data dan informasi, maka kewenangan pengelolaan data dan informasi program KB nasional masih tetap dipegang oleh pusat sebagai salah satu sub sistem informasi manajemen program keluarga berencana nasional (SSIM-PKBN). Penerapan *E-Government* di BKKBN Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Seperti dari segi perawatan dan pengembangannya yang membutuhkan alokasi dana yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, Faktor lain yang menjadi kendala dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN ini adalah dalam proses *updating*/ pemutakhiran data program KB ini dikarenakan keterlambatan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Analisa terhadap potensi faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal yang ada di BKKBN sebelum SSIM-PKBN tersebut diterapkan dapat memberikan kontribusi bagi BKKBN dalam melaksanakan penerapan SSIM-PKBN pada masa yang akan datang. Faktor – faktor lingkungan yang ada tersebut dari waktu ke waktu akan terus mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut dapat memiliki pengaruh yang lebih besar atau lebih kecil terhadap penerapan SSIM-PKBN di BKKBN, baik dalam faktor kekuatan dan kelemahan maupun faktor dari peluang

dan ancaman atau tantangan, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan yang mendasar, baik dari organisasi maupun dari masyarakat.

Faktor lingkungan tersebut apabila memiliki pengaruh besar terhadap kelemahan dan ancaman atau tantangan dalam penerapan SSIM-PKBN maka akan mempersulit pencapaian tujuan penerapan SSIM-PKBN di BKKBN yaitu meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Untuk itu diperlukan sebuah analisa supaya kekuatan kelemahan**,** peluang, ancaman atau tantangan dalam penerapan SSIM-PKBN di BKKBN dapat diketahui, dianalisa dan dijadikan bahan masukan bagi BKKBN dalam menerapkan SSIM-PKBN di masa yang akan datang. Selain itu analisa yang dilakukan sebelum SSIM-PKBN diterapkan juga bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi setelah SSIM-PKBN diterapkan, baik dampak terhadap BKKBN maupun masyarakat. Mengetahui dampak yang akan terjadi tersebut maka BKKBN dapat membuat suatu keputusan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penerapan SSIM-PKBN tersebut.

Kendala yang signifikan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN ini adalah kemampuan sumber daya manusia, yang terkadang kemampuan aparatur yang direkrut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat. Semua kegiatan yang berhubungan dengan SSIM-PKBN baik itu dalam segi teknis maupun non teknis dipusatkan di bidang IKAP BKKBN. Kendala teknis yang dihadapi dalam BKKBN dalam melaksanakan *E-Government* melalui SSIM-PKBN

yakni seperti komputer yang di pakai rusak atau kena virus. Kendala teknis lain yang dihadapi belum siapnya aparatur bidang IKAP BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang KB yang berbasis *E-Government*. Kendala non teknis yang dihadapi ialah kejadian yang tidak di duga seperti ada bencana alam, dan kebakaran.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintahan yang menerapkan *E-Government.* Inpres No 3 Tahun 2003 menekankan setiap intansi pemerintah harus menerapkan *E-Government*. Melihat dari kebijakan penerapan *E-Government* yang ada di Indonesia dapat di lihat bahwa penerapan *E-Government* di BKKBN telah berjalan sejak Tahun 2003 sampai dengan sekarang berarti sudah tujuh tahun di terapakan. Pemerintah hendaknya mencari solusi yang tepat agar penerapan *E-Government* tersebut efektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"Analisa Penerapan *E-Government* melalui Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional (SSIM-PKBN) dalam meningkatkan sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) di Jawa Barat"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi data infrastruktur analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi Program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana ketersediaan dasar hukum analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di dalam meningkatkan sosialisasi Program KB BKKBN Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana koordinasi antar instansi analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi Program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana ketersediaan aparatur analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi Program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana ketersediaan sarana teknologi analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi Program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat?
6. Bagaimana strategi pemikiran pemimpin analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi Program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi data infrastruktur Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui ketersediaan dasar hukum Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui koordinasi antar instansi Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN Dalam meningkatkan sosialisasi program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui ketersediaan aparatur Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui strategi pemikiran pemimpin Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang pelaksanaan proses penelitian mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang implementasi ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Banyak hal baru yang ditemukan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga menambah pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan dari berbagai teori yang dipelajari sangat idealis.
2. Secara teoritis, Penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai program study yang dipelajari di Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu bagi Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.
3. Secara praktis, penelitian yang dilakukan dengan cara pencarian data langsung ke sumber data yang bersangkutan, dapat memberikan kegunaan bagi instansi yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan para aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya aparatur di badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan penerapan SSIM-PKBN serta dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan Pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Penelitian dapat memberikan masukan-masukan yang diharapkan akan memberikan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan *E-Government*, terutama pada era *desentralisas*i. Penerapan-penerapan *E-Government* dalam rangka pemenuhan kebutugan masyarakat, terutama di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan, menuntut Pemerintah agar mampu menerapkan *E-Government* dengan sebaik-baiknya. Penerapan tersebut membutuhkan analisa-analisa dalam penerapannya. Analisa tersebut dimaksudkan sebagai upaya penilaian terhadap penerapan *E-Government.* Analisis merupakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan (Ali, 1995:37).

Menurut Dale Yoder yang dikutip oleh Mangkunegara mendefinisikan analisis sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Menerapkan dan mengembangkan pemerintahan yang berbasis *E-Government*, dengan tersedianya perangkat *elektronik* seperti komputer dan perangkat-perangkat lain yang mendukung proses penerapan *E-Government*. Kebijakan penerapan *E-Government* merupakan mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pemerintah, serta kalangan lain yang berkepentingan. Kebijakan penerapan *E-Government* sangat tepat dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir sekarang ini.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan merupakan hal, cara atau hasil (dalam Wirman dan Israwan, 2008 : 29), dalam hal ini penerapan diartikan sebagai sebuah hal, cara dan hasil kerja atau wujud dari *E-Government* dan sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang ini di Provinsi Jawa Barat.

Bank Dunia (*World Bank*) mengemukan *E-Government* sebagai :

> *"E-Government refers to the use by govermnent agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses,and other arms of goverment"*
> *E-Government* dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem informasi pemerintahan (seperti dalam *wide area networks*, internet, dan komunikasi berjalan) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negara lainya, para pebisnis dan berbagai elemen pemerintahan lainnya. (dalam Indrajit, 2004: 3).

Penerapan *E-Government* terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit dalam bukunya yang berjudul *Buku Pintar Linux : Membangun Aplikasi E-Government.* Bahwa analisis kebijakan penerapan *E-Government* ini meliputi:

1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan *E-Government*.
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju *E-Governmen*t.
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya Analisa penerapan *E-Government* melalui *E-Government*.
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan Analisa penerapan *E-Government* melalui *e-Government*.
5. Infrastuktur teknologi, penerapan *E-Government* banyak bertumpu pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
6. Strategi pemikiran dan kepemimpinan, penerapan *E-Government* sangat membutuhkan pemimpin yang membawa visi *E-Government* dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya.

(Indrajit, 2002:25).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa analisis kebijakan penerapan *E-Government* meliputi: *Pertama,* data infrastruktur dalam penerapan *E-Government*. Ketersediaan data infrastruktur sangat penting untuk dipenuhi seperti adanya manajemen sistem yang mendukung penerapan *E-Government*, memiliki dokumentasi, adanya kaulitas data serta keamanan data yang mendukung penerapan *E-Government* (Indrajit, 2002:25). Data infrastruktur merupakan sebuah dasar dalam penerapan *E-Government* karena jika data infratruktur tersebut tidak diperhatikan akan mempengaruhi penerapan *E-Government*. Penerapan *E-Government* dapat dikatakan berhasil jika data infrastruktur tersebut diperhatikan dan dijalankan.

Kedua, dalam penerapan *E-Government* dibutuhkan infrastruktur legal dari lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar hukum, serta peraturan-peraturan dalam penerapan *E-Government* (Indrajit, 2002:25). Infrastruktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. Dengan adanya

infrastruktur legal, maka penerapan *E-Government* mempunyai dasar hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang berlaku.

Ketiga, penerapan *E-Government* harus ditunjang dengan infrastruktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya (Indrajit, 2005:25). Infrastruktur institusional tersebut meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait (Indrajit, 2002:26). Dalam penerapan *E-Government* kesadaran aparatur yang tinggi sangat diperlukan. Kesadaran yang tinggi dari aparatur tersebut harus diikuti dengan eksistensi pemerintah dalam melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional merupakan faktor penunjang bagi kebijakan penerapan *E-Government*. Koordinasi antar instansi dalam memberikan informasi merupakan sebuah langkah yang baik dengan demikian kerjasama antar instansi akan semakin erat. Jika kerjasama antar instansi baik maka komunikasi pun akan mudah, dengan demikian maka penerapan *E-Government* akan berhasil jika memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut.

Keempat, penerapan *E-Government* juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka penerapan *E-Government* tidak dapat tercapai dengan baik. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah sikap aparatur dalam penerapan *E-Government,* aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan serta *skill* yang memadai, juga membudayakan berbagi informasi yang

mendukung penerapan *E-Government* (Indarajit, 2002:26). Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting. Penerapan *E-Government* tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya tidak diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam penerapan *e-Government.* Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka penerapan *E-Government* akan terhambat karena penempatan infrastruktur manusianya tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.

Kelima, dalam menunjang penerapan *E-Government* hal lain yang harus diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai faktor penting dalam penerapan *E-Government* karena merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun infrastruktur teknologi tersebut meliputi jumlah komputer dan jaringan komputer yang memadai sehingga memberikan kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya (Indarajit, 2002:26).

Keenam, keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari seorang pemimpin. Strategi dari seorang pemimpin tersebut memegang peranan yang penting dalam penerapan *E-Government*. Adapun strategi dari seorang pemimpin yang harus diperhatikan adalah seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, strategi yang berkualitas serta adanya kesadaran dari seorang pemimpin dan yang lebih penting adalah seorang pemimpin harus ditunjang dengan pengetahuan dan *skill* yang baik serta memiliki komitmen dalam penerapan *E-Government* tersebut (Indrajit, 2002:27).

Penerapan *E-Government* yang dilakukan saat ini bertujuan agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penerapan *E-Government* diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya. Penerapan *E-Government* saat ini merupakan sebuah tantangan yang besar yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat itu sendiri.

Suatu sistem sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan , karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah , baik yang berskala kecil maupun besar. Supaya dapat berjalan dengan baik diperlukan kerjasama diantara unsure-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Ada berbagai pendapat yang mendefinisikan pengertian sistem ,seperti dibawah ini :

> "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan , berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu".(Jogiyanto,2005,1).

Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan data itu sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian, sedangkan kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu .dalam hal ini informasi dan data saling berkaitan.

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Pengertian

informasi selalu dikaitkan dengan data, namun arti dari masing-masing kata dalam pengertian tersebut berbeda. Keberadaan suatu data sangat menunjang terhadap informasi , karena data merupakan bahan mentah yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

Sistem informasi manajemen menurut kertahadi suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara demikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya (kertahadi dalam Anwar. 2004 : 40). Tujuan Sistem informasi manajemen adalah menurut Murdick dan Ross adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsisitem suatu perusahaan/pemerintahan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses (Murdick dan Ross dalam Anwar. 2004 : 40)

Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran *(output)* dengan menggunakan masukan *(input)* dan berbagai *(proses)* yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Pengertian di atas dapat di lihat bahwa SIM merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberikan data kepada manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Data-data tersebut diolah oleh manajemen untuk menjadi sebuah informasi.

Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Penerapan *E-Government* di Provinsi Jawa Barat khususnya di BKKBN

dilaksanakan dengan pendirian perangkat (SSIM-PKBN) yang merupakan bagian dari *website www.bkkbn.go.id*, alat tersebut sebagai penyedian informasi bagi aparatur maupun masyarakat yang memerlukan Informasi KB di Provinsi Jawa Barat. Adapun pengertian (SSIM-PKBN) adalah:

> "Sistem informasi manajemen program keluarga berencana nasional yang selanjutnya disingkat (SSIM-PKBN) sub sistem informasi manajemen program KB nasional (SSIM-PKBN) yang bergerak dalam upaya penyediaan data dan informasi program KB nasional yang diperoleh dari hasil kegiatan pelaksanaan program KB yang memuat program berbagai jenis data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan keputusan" (Sumber: Bidang Informasi Keluarga dan Analis Program BKKBN Jabar).

Sejalan dengan itu disusunlah SSIM-PKBN yang mencakup pokok-pokok kegiatan perencanaan kebutuhan, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyebarluasan data dan informasi serta dokumentasi, yang berarti penyediaan data dan informasi tentunya akan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sasaran, untuk memberikan kemudahan bagi pengelola dan pelaksana SSIM-PKBN baik di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun pengguna data dan informasi lainnya, maka dalam proses pengembangannya tidak terlepas dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia, perangkat teknologi dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat mendukung terselenggaranya SSIM-PKBN.

SSIM-PKBN yang dikembangkan BKKBN ditempuh melalui dua sistem yaitu:

1. Sistem pencatatan pelaporan secara berjenjang yang dilakukan secara rutin setiap bulan di dalamnya meliputi data dan informasi sesuai dari hasil

pelayanan program KB nasional serta hasil pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun.

2. Sistem komputerisasi pengolahan data dan informasi aplikasi lain seperti aplikasi kepegawaian, gudang dan keuangan.

Demikian pula tuntutan akan data dan informasi tentunya memacu para pelaksana kegiatan untuk menentukan proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi yang lebih selektif dengan tingkat validasi dan akurasi yang semakin tepat, sehingga dalam penyajian data dan informasi dapat memberikan nilai dan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pengambil keputusan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sub sistem informasi manajemen program KB nasional adalah :

1. Kesisteman, artinya kelembagaan sub sistem informasi manajemen program KB nasional menjadi bagian dari suatu organisasi, dengan sejumlah unit kerja atau komponen yang ada dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. sub sistem informasi manajemen ini merupakan bagian dari sistem yang mengikat seluruh komponen dalam organisasi tersebut menjadi sistem total.
2. Teknologi, artinya teknologi informasi (komputer dan jaringan komunikasi) memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sub sistem informasi manajemen program KB nasional. Kemampuan teknologi informasi yang tinggi memberikan kemudahan akses dan peluang yang besar dalam menyediakan data dan informasi secara cepat, efektif dan efisien bagi pimpinan, pengelola dan pelaksana program.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pengelolaan sub sistem informasi manajemen program KB nasional adalah :

1. Bahwa SSIM-PKBN harus dilakukan secara terpadu, tertib dan berlanjut serta dikelola secara profesional dengan memanfaatkan dan memadukan unsur-unsur fungsional, saran dan prasarana baik secara intern maupun ekstern.
2. Bahwa SSIM-PKBN harus mampu menyediakan data dan informasi Program KB Nasional yang diperlukan secara cepat, tepat, akurat, relevan, mutakhir, dapat dipercaya dan terpilih sesuai dengan kebutuhan pimpinan, pengelola dan pengguna di setiap tingkatan wilyah.
3. Bahwa SSIM-PKBN harus mampu menyediakan data dan informasi Program KB Nasional yang bersifat inspiratif dan motivatif bagi pimpinan dan pengelola untuk mengambil keputusan, perumusan dan penetapan kebijaksanaan dalam memberikan pelayanan terbaik, berkualitas dan bermanfaat bagi publik dan masyarakat.
4. Bahwa SSIM-PKBN harus mampu menyediakan data dan informasi Program KB nasional yang strategis yang berasal dari sumber intern dan ekstern, dikelola secara baik, bertanggung jawab, mudah diakses dan mempunyai tingkat keamanan yang tinggi.
5. Bahwa SSIM-PKBN harus mampu menyediakan data dan informasi program KB nasional waktu lampau, saat ini dan proyeksi waktu mendatang.

Pengertian Untuk tidak menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap hal ikhwal yang berkaitan dengan Sub sistem informasi manajemen program KB nasional, dipergunakan pengertian dan batasan sbb :

1. Sub sistem informasi manajemen program KB nasional adalah bagian dari sistem program KB nasional, yang menyediakan data dan informasi pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana dan penguatan kelembagaan dan jaringan KB, untuk memberikan kemudahan kepada para pimpinan, pengelola dan pelaksana dalam mengambil keputusan, perumusan dan penetapan kebijkasanaan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, bermutu dan bermanfaat bagi publik atau masyarakat.
2. Teknologi informasi meliputi bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa, teknik pengelolaan yang digunakan dalam penanganan dan pengolahan informasi, penerapan bidang dan tekniknya, *Computer* dan interaksinya dengan manusia, mesin dan masalah sosial, ekonomi serta budaya yang berkaitan dengan semua hal tersebut.

Penyajian dan penyebarluasan data dan informasi, adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut dari proses kegiatan analisis dan evaluasi data dan informasi dengan menyajikan data dan informasi dalam bentuk table, grafik, peta maupun gambar melalui sarana papan data, terbitan, ruang pola, pameran dan teknologi informasi serta menyebarluaskan kepada pemakai/pengguna sesuai dengan segmentasi sasaran.

Pemakai data dan informasi, adalah para pengelola, pelaksana dan pengguna lainnya baik di lingkungan BKKBN maupun diluar BKKBN yang memanfaatkan atau mendayagunakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pelayanan kepada masyarakat dan keperluan lain sesuai kebutuhan pengguna. Pendokumentasian data dan informasi, adalah serangkaian kegiatan yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pelayanan kepada masyarakat dan keperluan lain sesuai kebutuhan pengguna.

Berkaitan dengan pelaksanaan penerapan *E-Government*, pemerintah perlu menginformasikan program keluarga berencana maka pemerintah harus mensosialisasikan agar masyarakat mengetahuinya arti penting menggunakan KB. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan *(role theory).* Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

> "sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu" (Wikipedia Indonesia, melalui http://id.wikipedia.org./wiki/sosialisasi)".

Berdasarkan pendapat di atas sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman kebiasaan nilai dan aturan dalam sebuah kelompok atau masyarakat atau sebagai teori

mengenai peranan karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran- peran yang harus dijalankan oleh individu. Proses dasar sosialisasi adalah keluarga, akan tetapi peran media terhadap proses tersebut menjadi salah satu faktor penting keberhasilan sosialisasi. Media adalah agen dari proses sosialisasi. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

Sosialisasi primer Menurut Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 Tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam

masyarakat. Salah satu bentuknya adalah *resosialisasi* dan *desosialisasi*. Dalam proses *resosialisasi,* seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama. Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. contoh, standar 'apakah seseorang itu baik atau tidak' di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangannya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada.

Faktor tingkat pendidikan yang tinggi juga memudahkan proses sosialisasi KB yang telah mengenal pendidikan cenderung mudah menerima informasi-informasi yang diberikan sehubungan dengan KB, dari situlah dapat dikatakan pula bahwa dalam entitas sosial masyarakat sendiri juga sudah ada modal sosial yang dalam hal ini berupa budaya dan pendidikan, yaitu bahwa kedua hal tersebut membantu membawa masyarakat ke arah perkembangan itu sendiri.

Perkembangan tersebut, yang dalam hal ini adalah keberhasilan program KB di Jawa Barat Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberhasilan program KB tidak hanya memperbaiki tingkat penekanan (*Total Fertility Rate*) TFR, namun juga memperbaiki tingkat kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan, dari ranah kesehatan, adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan di posko KB, memberikan pengetahuan tersendiri pada masyarakat mengenai penyakit-penyakit, khususnya

sehubungan dengan organ reproduksi (kista, dll), dari situlah pengobatan terhadap penyakit-penyakit tersebut dapat dilakukan.

Selanjutnya, prinsip dasar program KB (anak cukup dua; pengaturan jumlah anak demi perencanaan kesejahteraan lebih lanjut) membawa masyarakat ke arah perbaikan ekonomi, yang pada akhirnya membawa pula masyarakat ke arah perbaikan tingkat pendidikan serta kesejahteraan secara umum, hal ini dilakukan secara melembaga, konsisten melalui adanya posko-posko KB (di puskesmas dan pustu), penyuluhan, serta kegiatan-kegiatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini menjadi suatu kebiasaan dan kebanggaan tersendiri dalam masyarakat, dapat dilihat dari adanya simbol-simbol KB mulai dari monumen kecil sampai stiket yang dengan bangga ditempatkan di seluruh pedukuhan di Jawa Barat oleh masyarakat sendiri.

Program KB membawa dampak positif yang dalam hal ini adalah terciptanya nilai-nilai baru dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui adanya kesadaran yang tercipta dalam masyarakat, yaitu untuk tidak memiliki anak lebih dari dua, dengan atau tanpa mengikuti program KB. Dinamika masyarakat yang didukung oleh perkembangan teknologi, sarana transportasi, sarana pendidikan, serta sosialisasi seputar isu kesejahteraan dan kesehatan melalui program KB memunculkan adanya suatu modal sosial lain yang berupa nilai-nilai tersebut, hal ini terjadi secara bertahap dan melalui suatu proses yang melibatkan kurun waktu yang lama, menghasilkan suatu perubahan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti menyusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisa adalah pengamatan yang diperoleh melalui penyelidikan dari sebuah tindakan/keputusan yang di lakukan oleh BKKBN dalam mensosialisasikan KB melalui SSIM-PKBN di Provinsi Jawa Barat.
2. Penerapan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang di lakukan oleh BKKBN dalam mensosialisasi KB melalui SSIM-PKBN, di Provinsi Jawa Barat.
3. *E-Government* adalah pengembangan yang berbasis elektronik melalui sebuah alat yang berbentuk seperangkat komputer yang *stand alone* untuk dalam mensosialisasikan KB melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id,* di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
4. SSIM-PKBN adalah suatu aplikasi yang di dalamnya terdapat satuan komponen-komponen. SSIM-PKBN, tersebut terdapat di BKKBN Provinsi Jawa Barat yang berfungsi untuk mensosialisasikan KB.
5. Sosialisasi adalah proses pengenalan berangsur-angsur oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam mengenalkan materi program KB melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id*.
6. Analisa penerapan *E-Government* adalah pengamatan suatu tindakan yang di lakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id,* untuk meningkatkan sosialisasi program KB. Faktor yang mempengaruhi Analisa penerapan *E-Government* dalam meningkatkan sosialisasi KB yang dapat dilihat dari operasionalisasi konsep berikut:

1) Kondisi data infrastruktur adalah keadaan data dan informasi yang ada di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB melalui SSIM-PKBN di Provinsi Jawa Barat, diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

   a. Ketersediaan manajemen sistem adalah yang mendukung dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id*, dalam meningkatkan sosialisasi program KB, diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

      1. Ketegasan adalah menekanakan tujuan yang ingin dicapai BKKBN dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB kepada masyarakat.
      2. Ketetapan prosedur adalah aturan yang berlaku dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN untuk meningkatkan sosialisasi program KB di Provinsi Jawa Barat.
      3. Adanya ketetapan kebijakan adalah peraturan dari BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB melalui SSIM-PKBN.
      4. Penyusunan anggaran adalah rencana anggaran yang di keluarkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi program KB melalui SSIM-PKBN.

   b. Adanya dokumentasi adalah tindakan BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam penyimpanan data yang mendukung dalam peningkatkan sosialisasi program

KB melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id,*, diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

1. Alat dokumentasi adalah komputer suatu alat yang mendukung untuk penyimpan data guna meningkatkan sosialisasi program KB melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
2. Tempat menyimpan dokumentasi adalah alat penyimpanan data berupa program peningkatan sosialisasi KB yaitu SSIM-PKBN yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
3. Evaluasi adalah perbaikan terhadap apa yang di lakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN.

c. Ketersediaan data yang berkualitas adalah suatu data yang akurat yang di berikan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id,*, diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

1. Keakuratan data adalah kepastian data SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
2. Ketepatan waktu adalah proses untuk mengukur kadar maksimal dan minamalnya dalam sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN.

3. Data yang sesuai adalah pemberian informasi data yang akurat oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN.
4. Kelengkapan data adalah faktor penting dalam memberikan informasi BKKBN dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB.
5. Keamanan data adalah data yang diperoleh di jaga dan di lindungi agar aman dari hal-hal yang tidak di inginkan yang berhubungan dengan analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB.

2) Ketersediaan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat dan bersifat baku dalam mensosialisasikan KB kepada masyarakat melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id*, diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:
   a. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah peraturan yang mengikat berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat .
   b. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah yang mendasari BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN di Provinsi Jawa Barat.
3) Koordinasi antar instansi adalah kerjasama yang di lakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN,

bagian dari *website www.bkkbn.go.id* diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

a. Koordinasi antar organisasi adalah kerjasama antar satuan struktur organisasi dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
b. Kerjasama antar instansi adalah kerjasama antar badan dengan instansi maupun kantor terkait dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
c. Komunikasi antar instansi adalah interaksi antar badan dengan instansi maupun kantor terkait dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

4) Ketersediaan aparatur adalah aparatur yang ada dalam mensosialisasikan KB melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat, diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

a. Pengetahuan adalah tingkat pengetahuan yang di mimiliki aparatur BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN.
b. *Skill* adalah Kemampuan dan keterampilan aparatur BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN.
c. Budaya organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN.

d. Kuantitas aparatur adalah jumlah aparatur yang di miliki BKKBN Provinsi Jawa Barat yang memadai dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN.

5) Ketersediaan sarana teknologi adalah fasilitas yang tersedia berupa sarana teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak (komputer dan jaringan komputer) dalam meningkatkan sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat, diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

a. Adanya komputer adalah jumlah perangkat komputer di BKKBN Provinsi Jawa Barat di bidang IKAP.

b. Adanya jaringan komputer adalah tersedinya fasilitas untuk mensosialisasikan KB lewat jarring komputer (*internet*) melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

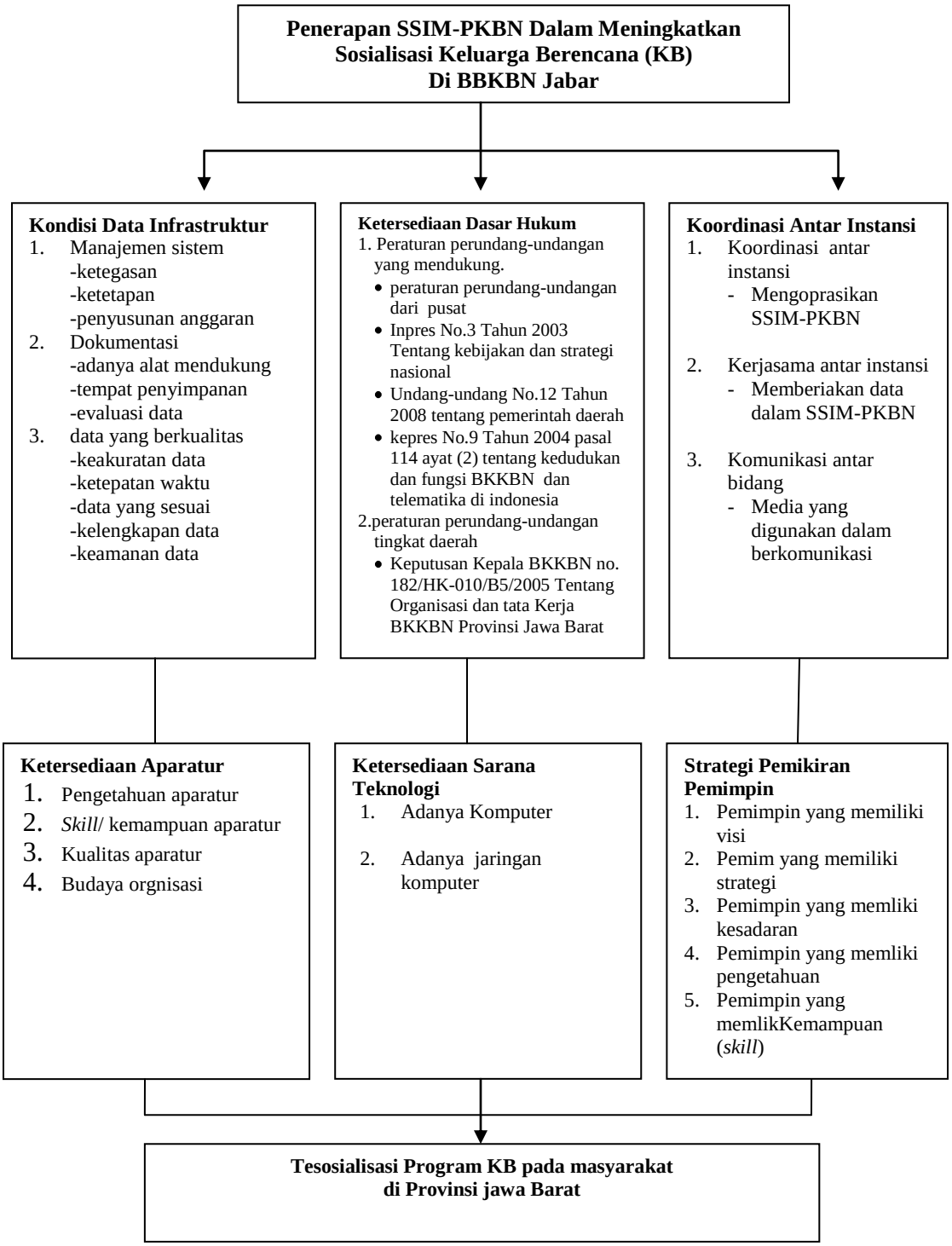
6) Strategi pemikiran pemimpin adalah cara kepala bidang IKAP di BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan KB melalui SSIM-PKBN bagian dari *website www.bkkbn.go.id*. diukur dengan menggunakan operasionalisasi sebagai berikut:

a. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas adalah keinginan dan harapan dari kepala bidang IKAP BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN.

b. Pemimpin yang mempunyai strategi adalah cara yang di miliki kepala bidang IKAP BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN.
c. Pemimpin memiliki kesadaran adalah kesadaran mencerminkan pemimpin yang baik karena telah menyadari apa yang seharusnya beliau lakukan dalam analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di Provinsi Jawa Barat.
d. Pemimpin memiliki pengetahuan adalah wawasan kepala bidang IKAP BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi program KB di Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN.
e. Pemimpin Memiliki *skill* adalah mempunyai keterampilaan dalam meningkatkan sosialisasi program KB di Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN.

Berdasarkan pada teori, konsep, definisi operasional dan indikator-indikator di atas, peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode tersebut dapat mengarahkan penelitian dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Dikutip dari buku Nawawi dan hadad yang berjudul *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Metode penelitian deskriptif adalah

> "Prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang" (Nawawi dan Hadari, 2006:67).

Maka metode deskriptif ini adalah salah satu cara dalam pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan suatu objek yang di selidiki bedasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian serta peneliti merupakan instrumen kunci dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika)

Berdasarkan metode tersebut, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:

> "Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

> pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi" (Sugiyono, 2005:1).

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman orang yang diteliti mengenai tingkah laku serta harus dapat memahami proses.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu

1. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati di bidang data dan informasi yang diharapkan. peneliti dalam melakukan penelitian mengenai penerapan SSIM-PKBN.
2. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi melalui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan ataupun bisa melalui telepon. Peneliti mewawancarai aparatur yang berada di badan koordinasi keluarga berencana nasional Provinsi Jawa Barat, dengan cara melakukan tanya jawab kepada aparatur, yang mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai penerapan SSIM-PKBN.

3. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mencari buku-buku pegangan yang berhubungan dengan analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Sanapiah Faisal, teknik pengambilan sampel *purposive* adalah:

> "teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Faisal, 1999:67)".

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

1. Staf Bidang Sekertariat BKKBN Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah pelayan administrator dan pengolahan sumber daya BKKBN Provinsi Jawa barat.

2. Kepala Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program, M.MPD sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN.
3. Staf Bidang Informasi dan Analisis Program BKKBN. Beliau adalah orang yang mengetahui tentang penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
4. Staf Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program BKKBN sebagai pelaksana dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat.
5. Staf Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian BKKBN Provinsi Jawa Barat yang mengetahui tentang sosialisai KB yang di lakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Penentuan informan untuk narasumber yang kedua adalah masyarakat yang membutuhkan tentang informasi proram KB dalam hal ini orang yang ingin mengetahui program KB yang ada di Provinsi Jawa Barat. Peneliti menggunakan *purposive*, dikarenakan teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan dijadikan sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Menurut Sanafiah Faisal teknik pengambilan sampel *purposive* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random.

Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Faisal, 1996:67). dalam *purposive* peneliti akan menentukan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu, apabila telah cocok peneliti akan menjadikan sebagai sumber data. Peneliti akan menjadikan investor yang akan menginvestasikan modalnya sebagai narasumber, karena investor ini sedang mencari informasi tentang penanaman modal.

Informan selanjutnya dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membutuhkan Informasi tentang KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat melalui SSIM-PKBN, oleh karena itu untuk lebih jelasnya tentang informan masyarakat dapat dilihat pada daftar nama informan yang telampir dalam naskah skripsi ini.

1.6.3 Teknis Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* dapat diartikan sebagai berikut:

> "Penelitian kualitatif adalah strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana [*setting*] tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar *grounded* (dalam Suyanto, 2005:183)".

Penelitian kualitatif ini merupakan penyelidikan dalam mendekati suatu suasana tanpa menggunakan hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, karena muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar dalam data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari

Sugiyono dengan bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif*, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

> 1. *"Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisia dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
> 2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
> 3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat (Sugiyono, 2007:92-99)".

Proses dari analisa data berdasarkan sistuasi di lapangan adalah *pertama*, peneliti mereduksi data yaitu memperjelas data yang telah diperoleh peneliti di lapangan, segingga dapat memperjelas fokus masalah. *Kedua*, peneliti menyusun data-data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga dalam penyajiannya akan mudah dipahami. Langkah selanjutnya adalah *finising* atau penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat mengetahui hasil yang teliti tentang analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi program keluarga berencana KB di Provinsi Jawa Barat , oleh kerena itu kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Badan Koordinasi Keluarga Nasional Provinsi Jawa Barat (BKKBN), JL. Surapati No.122 Bandung Kode Pos 40122 Telp.(022) 7203806.

Tabel 1.1
Tabel Lokasi dan Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2010					
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Rencana pengajuan judul						
Usulan Penelitian						
Seminar Usulan Penelitian						
Pengumpulan Data						
Pengolahan Data						
Penulisan Skripsi						
Sidang Ujian Skripsi						